

**KINERJA APARATUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

Sabilatul Husain¹

Dwi Indah Kartika, S.Pd., M.Si²

Ayu Widowati Johannes, S.STP., M.Si³

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Telp. (022) 7798252 – 7798253 Fax. (022) 7798256, Kode Pos 45363

JATINANGOR – SUMEDANG

husainsabil@gmail.com

ABSTRACT

This study entitled: Performance of Environmental Service Officials in Waste Management in Bandung Regency, West Java Province. This study aims to determine the performance of environmental service officials in waste management, knowing the obstacles that exist during implementation, and efforts to overcome these obstacles. The method used by the writer is descriptive qualitative. Data collection techniques used by the author are observation, interviews, documentation. Meanwhile, to analyze the data, the authors used data reduction techniques, data exposure, and drawing conclusions. The results obtained by the author after conducting research on apprenticeship activities are the performance of environmental service officials in waste management is still considered ineffective because there are several external and internal factors faced by the Bandung Regency environmental office. The obstacles experienced by the environmental office of Bandung Regency are the amount of waste per day up to 1440 tons, they do not have their own TPA, limited facilities and infrastructure, low competence of employees, do not have effective technology in waste management, and a minimal budget because they are not considered as priorities for regional spending. , and low law enforcement and community behavior in waste management. As an effort by the environmental service to overcome this problem, it is to form several programs through waste handling methods (conventional) and waste reduction with a system approach, establish several regulations, collaborate with various parties and give appreciation to employees and environmental activists. It is hoped that with these efforts the performance of the environmental service apparatus can be maximized.

Keywords: Performance, Waste Management, Apparatus

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: Kinerja Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja aparatur dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah, mengetahui hambatan yang ada saat pelaksanaan, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh penulis setelah melakukan penelitian pada kegiatan magang adalah kinerja aparatur dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah dinilai masih kurang efektif karena ada beberapa faktor

eksternal dan internal yang dihadapi dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung tersebut. Hambatan yang dialami dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung ialah jumlah sampah per harinya hingga 1440 ton belum memiliki TPA sendiri, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kompetensi pegawai, belum memiliki teknologi yang efektif dalam pengelolaan sampah, serta anggaran yang minim karena dianggap bukan ketetapan prioritas belanja daerah, dan rendahnya penegakan hukum serta perilaku masyarakat sendiri dalam pengelolaan sampah. Sebagai upaya yang dinas lingkungan hidup untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah membentuk beberapa program melalui metode penanganan sampah (konvensional) dan pengurangan sampah dengan pendekatan sistem, menetapkan beberapa regulasi, melakukan kerja sama dengan berbagai pihak serta memberikan apresiasi kepada pegawai dan pegiat lingkungan. Diharapkan dengan upaya tersebut kinerja aparatur dinas lingkungan hidup dapat lebih maksimal.

Kata Kunci: Kinerja, Pengelolaan sampah, Aparatur

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kini permasalahan dunia termasuk Indonesia adalah masalah sampah. Setiap daerah di Indonesia hampir memiliki masalah yang sama yaitu sampah. Sampah hasil dari aktivitas manusia mulai membludak seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di pedesaan dan perkotaan di Indonesia. Masalah ini ialah PR (Pekerjaan Rumah) besar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah ini dan perlu penanganan serius berkelanjutan karena selama manusia hidup maka sampah terus dihasilkan.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan kewajiban pemerintah memfasilitasinya baik dari segi sarana dan prasarana, atau penggunaan teknologi, penelitian, pengembangan serta melakukan koordinasi antar lembaga untuk bersama-sama melaksanakan penanganan dan pengelolaan sampah. Maka dari itu setiap daerah harus melaksanakan tugas tersebut. Pemerintah Kabupaten Bandung meluncurkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang menginstruksikan pengelolaan sampah harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Keberadaan sistem Desentralisasi, adanya pembagian urusan pemerintahan, salah satunya masalah lingkungan, maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung mengemban tugas pemerintah daerah yang memiliki tupoksi dalam mengurus permasalahan lingkungan hidup. maka dari itu perlu adanya peningkatan kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan tersebut. Selain tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup, permasalahan sampah juga menjadi tanggung jawab bersama dengan masyarakat, karena hakikatnya sampah dihasilkan oleh kita maka kita pula sebagai sumber solusi, sehingga perlu adanya pembinaan dari Pemerintah Daerah khususnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung untuk dapat membina, mampu mengajak dan bekerja sama dalam pengelolaan sampah.

1.2 Permasalahan

Produksi sampah di Kabupaten Bandung cukup besar berdasarkan media berita (Abdalloh, Mildan. 2019) menerangkan bahwa Kepala Bidang Penyelamatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bandung Yula Zulkarnain mengatakan, dengan 3 juta penduduk, produksi sampahnya per harinya mendekati 1.440 ton. Selasa (11/6/2019).

Dikutip dari *www.bandungkab.go.id*. situs resmi milik Pemerintah Kabupaten Bandung, (analisis 2006). Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah 176.239 ha. Terdiri dari 31 kecamatan, 266 Desa, dan 9 Kelurahan serta penduduknya sebanyak 2.943.283 jiwa. Luasnya wilayah, menyebabkan berbagai keterlambatan dalam pengangkutan sampah, serta biaya yang cukup besar, ditambah Kabupaten Bandung belum memiliki TPA. Dikutip dari sebuah berita (Fattah, 2019) mengatakan bahwa ribuan ton sampah tak tertangani, biaya 30 miliar per tahun dipotong 5 miliar untuk bayar retribusi pembuangan sampah ke TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat milik Pemprov Jabar “salah satu solusinya Pemkab Bandung harus mempunyai TPA sendiri” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Yayat Hidayat. Sabtu (24/8/19).

Sampah harusnya dikelola dengan baik, sebagaimana Sejati (2009:24) dalam bukunya *Pengelolaan Sampah Terpadu* mengatakan bahwa pengelolaan sampah adalah segala aktivitas yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Pemerintah harus membentuk strategi dengan tepat.

Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

Aspek Kajian	Capaian kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan DLH Kab.Bandung
		Internal	Eksternal	
Perencanaan pengelolaan sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah 2. Penetapan lokasi tempat Stasiun Peralihan Antara (SPA) Bojong, TPS, TPST dan TPA sampah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang memadai 2. Kurang memadainya sarana prasarana pengumpulan (TPS), pengangkutan (Armada), pengolahan (TPST/TPS3R/ Bank Sampah, dll) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan BPSR Provinsi Jabar, PD, kewilayahan (Camat/Desa/ kelurahan dan muspika) serta seluruh komponen masyarakat peduli lingkungan 2. Terbatasnya lahan yang memenuhi kriteria teknis, administrasi dan sosial yang akan dijadikan lokasi sarpras (sarana dan prasarana) pengelolaan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum memadainya Kapasitas SDM 2. Belum optimalnya koordinasi dan membangun jejaring kerja dengan instansi terkait 3. Perencanaan pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah belum optimal
Pengembangan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan fasilitas daur ulang sampah (TPST Pemda) dan Bank sampah induk 2. Penyediaan sarpras penanganan sampah: <ul style="list-style-type: none"> • Sumber sampah: karung berlogo, tempat sampah tematik • Pengangkutan: motor roda tiga, gerobak sampah, armada • Pengolahan sampah : Komposter komunal, mesin pencacah, LCO • Pemanfaatan : <i>Biodiges-ter, Landfiil gas recovery, pirolisys</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya lahan sarpras pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan sampah 2. Biaya operasional / pemeliharaan pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan sampah 3. Terbatasnya Lahan untuk penyimpanan armada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan teknologi tepat guna 2. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah 3. Kompensasi jasa pelayanan KJP (Kompensasi Jasa Pelayanan) KDN (Kompensasi Dampak Negatif) 4. Alih teknologi pengolahan sampah memerlukan pakar yang memahami di bidang tersebut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya lahan yang memenuhi kriteria teknis, administrasi dan sosial untuk kepentingan pengelolaan sampah 2. Terbatasnya sarana dan prasarana pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan sampah 3. Tingginya biaya operasional / pemeliharaan pengolahan dan pemanfaatan sampah 4. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah 5. Tingginya biaya kompensasi jasa pelayanan KJP KDN
Pembinaan dan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan pengelolaan sampah kepada tiga pilar Desa (Kades, BPD, LPM) seKabupaten Bandung 2. Pengawasan pembuangan sampah liar oleh masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dan jenis alat peraga sosialisasi 2. SDM yang memahami pengelolaan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi aktif peserta sosialisasi 2. Keterbatasan waktu narasumber menyampaikan materi 3. Aplikasi/ Tindak lanjut penerapan hasil pembinaan oleh peserta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang optimalnya ketersediaan dan jenis alat peraga sosialisasi 2. Belum optimalnya kapasitas SDM yang memahami teknologi pengelolaan sampah

Aspek Kajian	Capaian kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan DLH Kab.Bandung
		Internal	Eksternal	
	kat dan pelaku usaha/kegiatan 4. Pelaksanaan kerjasama dengan Prov. Jabar dalam kemitraan sarana pengangkutan dan Tempat pembuangan sampah akhir 5. Kerjasama dengan pelaku usaha/kegiatan pengelola sampah 6. Pembinaan TPS 3R melalui pemberdayaan Bank sampah		4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dalam pengawasan pelaku pembuangan sampah liar 5. Koordinasi dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Jabar • OPD terkait • Pelaku usaha/kegiatan pengelola sampah • Bank Sampah 	3. Belum maksimal Partisipasi aktif peserta sosialisasi 4. Masih rendahnya peserta yang mengaplikasikan/ menindak lanjuti hasil pembinaan pengelolaan sampah 5. Belum optimalnya koordinasi dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Aparat penegak hukum (APH) dalam pengawasan pembuangan sampah liar Provinsi Jabar • OPD terkait • Pelaku usaha/kegiatan pengelola sampah Bank Sampah
Sekretariat	1. BMD 2. SAKIP	1. Ketersediaan dan kapasitas SDM dan sarana prasarana 2. Pengawasan SPIP	1. Data pelimpahan BMD dari OPD Dispertasih ke DLH 2. Sistem keamanan penyimpanan BMD 3. Koordinasi SPIP dengan Inspektorat dan BKPPD	1. Belum optimalnya Ketersediaan dan kapasitas SDM dan sarana prasarana 2. Pengawasan SPIP yang belum optimal 3. Data pelimpahan BMD dari OPD Dispertasih ke DLH yang tidak akurat 4. Belum optimalnya Sistem keamanan penyimpanan BMD 5. Belum optimalnya Koordinasi SPIP dengan Inspektorat dan BKPPD

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian terdahulu telah menginspirasi penelitian ini, baik dalam konsep kerjanya atau pada pengelolaan sampah. Pada penelitian (Julian, 2018) mengenai Kinerja Dinas lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, lalu hasil penelitian (Trisakti dkk, 2020) yang berjudul Analisis Kinerja Pelayanan Tata Kelola Sampah di Kabupaten Bandung serta pada hasil penelitian (Lusi, 2018) dengan penelitiannya yang berjudul Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek). Pada penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, sehingga penulis tertarik untuk lebih dalam meneliti bagaimana Kinerja Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat secara lebih luas cakupannya.

Selain lokus penelitian di Kabupaten Bandung, ada juga penelitian terdahulu di lokasi lain seperti (Annisa, 2013) dengan judul Kinerja Pengelolaan Sampah Perusahaan Daerah (PD)

Kebersihan di Kecamatan Coblong di Kota Bandung, dan skripsi yang berjudul Kinerja Aparatur dalam Pengelolaan Sampah Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palolpo karya (Asrun, 2019)

Berdasarkan penelitian (Julian, 2018), (Trisakti dkk, 2020), (Lusi, 2018) hanya terkhusus pada UPT pengangkutan saja serta lokus dibatasi hanya pada permasalahan di UPT pengangkutan Wilayah, sehingga fokus penelitian hanya terbatas pada lokus tersebut, namun dari hasil penelitiannya penulis mendapatkan data-data yang menginspirasi penulis untuk dapat meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan sampah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu, mulai dari fokus penelitiannya, lokusnya, maksud dan tujuan, teori indikator penulis yakni tentang kinerja berbeda dengan penelitian (Trisakti dkk, 2020) yang berjudul Analisis Kinerja Pelayanan Tata Kelola Sampah di Kabupaten Bandung, dimana penelitian beliau hanya terfokus di UPT Pengangkutan Ciparay. Jika dibandingkan dengan kajian penulis, maka penelitian penulis lebih luas lagi dari penelitian sebelumnya, jadi penelitian ini mencoba mengembangkan penelitian sebelumnya dengan diperluas kajiannya. Sebagaimana pada penelitian (Julian, 2018) dan (Lusi, 2018) hanya terkhusus pada UPT pengangkutan saja, tetapi kajian penulis pada penelitian ini, selain membahas UPT pengangkutan, juga membahas UPT baru yakni UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah sebagai UPT baru dengan paradigma baru dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung.

Analisis teori yang digunakan masing-masing penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian penulis berbeda. Pada penelitian (Julian, 2018) menggunakan teori kinerja organisasi dari Dwiyanto. Selanjutnya (Trisakti dkk, 2020) menggunakan teori indikator kinerja sektor publik menurut Selim dan Woodward dalam Nawawi. Lalu penelitian (Lusi, 2018) menggunakan teori kinerja organisasi dari Dwiyanto, berikutnya penelitian (Annisa, 2013) analisis teorinya menggunakan Agus Dwiyanto, dan yang terakhir pada penelitian (Asrun, 2019) teori yang digunakannya yaitu teori pengukuran kinerja menurut Armstong dan Baron.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian penulis baik dari segi analisis teori yang digunakan, konsep penelitian, lokus penelitian, fokus dan tujuan penelitian, serta regulasi yang berlaku.

1.5 Tujuan

Dari berbagai permasalahan diatas penulis hendak meneliti bagaimana Kinerja Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Dalam Pengelolaan Sampah, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat serta bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah. Berikut beragam permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 dibawah ini

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengambilan data sebagaimana menurut Simangunsong (2016:191) bahwa peneliti sendiri yang mengumpulkan data utama dengan metode observasi, wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan dokumentasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang pengelolaan sampah, Aparatur dinas lingkungan hidup, kinerja pengelolaan sampah, dan program-program kegiatan dalam pengelolaan sampah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya akan mempekerjakan pegawai dengan berbagai perencanaan, salah satunya merencanakan kinerja dalam manajemennya agar dapat mencapai sasaran tujuan organisasi. maka setiap pegawai sesuai perjanjian kerja diharuskan berkinerja tinggi sesuai standar yang telah ditetapkan bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian kinerja pegawai menurut Ljian Poltak Sinambela (2012:5) diartikan sebagai “Kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu” Selanjutnya Rivai dan Basri (2005:14) dalam Sinambela mendefinisikan kinerja “Hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama kurun waktu tertentu dalam pelaksanaan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama”.

Maka kinerja adalah kemampuan melakukan suatu pekerjaan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Kinerja berarti tentang bagaimana kemampuan atau keahliannya dalam suatu tugas tertentu dengan tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan bersama. Sebagaimana dikatakan oleh Sedarmayanti (2017:463) bahwa kinerja ialah “Hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok di suatu organisasi berdasarkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing untuk tercapainya target organisasi dengan legal, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan etika dan moral”.

Baik buruknya kinerja organisasi dapat diukur dengan indikator kinerja organisasi salah satunya dengan efektivitas dan efisiensi (Kast dan Rosenzweig, 1974:174) dalam Sinambela. Untuk mencapai kinerja kelompok harus memperhatikan keharmonisan kinerja tim, serta perbedaan sudut pandang antara solusi individu dan keputusan kelompok dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, sehingga keberhasilan atau kegagalan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi bergantung pada kemampuan mereka untuk memimpin tim secara keseluruhan. Maka dari itu, setiap unit baik individu, tim, kelompok atau organisasi saling berperan untuk berkinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3.1 Teori yang digunakan

Pengukuran kinerja dapat dilihat dari beberapa indikator, sebagaimana yang diuraikan oleh Robbins dalam Sulaksono (2015:199) menetapkan beberapa indikator pengukuran kinerja terhadap hasil kerja secara individu diantaranya:

1. Kualitas, pengukuran dilihat dari sudut pandang pegawai terhadap kualitas hasil pekerjaannya baik dari sisi kesempurnaan tugas, keterampilan dan kemampuannya;

2. Kuantitas, adalah jumlah yang dihasilkan dari aktivitas pekerjaannya dengan alat ukur berupa jumlah, unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan;
3. Ketepatan waktu ialah aktivitas yang diselesaikan di awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain;
4. Efektivitas, ialah tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, dan bahan baku) yang dimaksimalkan bertujuan menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya;
5. Kemandirian, ialah tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya sesuai komitmen kerja. Kemandirian merupakan tingkat di mana karyawan memiliki komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

Hasil akhir pengukuran kinerja menurut Sembiring (2012:83) adalah informasi mengenai kinerja individu, kelompok atau unit dan seluruh organisasi. Pentingnya informasi tentang pengukuran kinerja tersebut harus disepakati bersama, karena akan mempengaruhi motivasi, sikap dan tingkah laku anggota organisasi, yang akan berpengaruh pada kinerja organisasi

3.2 SOP Pengelolaan Sampah

Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dituntut menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan dengan menetapkan beberapa regulasi dan strategi dalam pengelolaan sampah, maka disusunlah SOP pengelolaan sampah sebagai berikut:

a. Penanganan Sampah;

Metode konvensional kumpul-angkut-buang yang melayani titik angkut dari beberapa TPS yang terdaftar dengan biaya retribusi atau TPS-TPS liar lalu dibawa ke TPST pada UPT Pengangkutan Sampah masing-masing wilayah seperti UPT pengangkutan sampah Soreang, Ciparay, Baleendah, dan Rancaekek untuk dipilah sebelum dibuang ke TPA.

b. Pengurangan Sampah.

Metode edukasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah seperti; penyelesaian sampah organik rumah tangga dengan LCO (Lubang Cerdas Organik) dan sampah anorganik ke bank sampah, setiap individu diwajibkan membawa tumbler dan kantong belanja sendiri. Pada skala komunal dibentuk Puspa (Pusat Edukasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah) pada unit baru yaitu UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah (UPT PPS) dibentuk tahun 2020 di Jelegong. Prosesnya dimulai dari mengangkut sampah dari berbagai TPS di wilayah sekitar, yang anorganik langsung dibawa ke PDU (Pusat Daur Ulang) dan sampah organik diolah melalui sirkuler ekonomi yaitu sebagai berikut:

1. Budidaya Maggot;

Budidaya Maggot dari sampah organik untuk diolah menjadi pakan ternak atau ikan dan sisanya bisa digunakan untuk pupuk atau pembuatan briket.

2. Peuyemisasi;

Fermentasi sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang lagi, di tempatkan pada bak besar dan difermentasi selama 2 minggu dengan cairan Bioaktivator. Setelah itu dicacah dengan mesin untuk dibuat briket.

3. Budidaya ternak, ikan, tanaman dan produksi briket;

Bentuk pemanfaatan sampah dengan sirkuler ekonomi, yaitu hasil dari Maggot untuk pakan, pupuk bagi tanaman, residunya dibuat briket untuk bahan bakar bagi industri rumahan seperti tahu Sumedang sebagai pengganti gas atau kayu bakar.

3.3 Analisis Teori

Berdasarkan Perbub Kabupaten Bandung Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bandung Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 3 bahwa ditargetkan tahun 2025 pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah 70%. Maka dari Pelaksanaan SOP diatas, kinerja Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Bidang pengelolaan sampah hingga tahun 2020 ini sudah cukup baik di kisaran 62% dengan 22% di pengurangan dan 40% di penanganan. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Aparatur Dinas Lingkungan Hidup penulis menggunakan indikator Robbins dengan analisis sebagai berikut:

A. Kualitas

Kualitas dari sisi hasil dan kesempurnaan tugas pegawai dalam pengelolaan sampah cukup baik. Mengingat pengelolaan sampah juga adalah kewajiban masyarakat tetapi sebagian besar kewajiban itu diambil alih oleh para pegawai. Selanjutnya kualitas dari keterampilan dan kemampuan pegawai menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah (UPT PPS) belum merata, rata-rata pegawai di UPT Pengangkutan hanya mampu mengangkut dan memilah sampah, belum hingga mengelola dan memanfaatkan sampah seperti pegawai di UPT PPA, karena UPT PPS baru terbentuk 1 titik saja yang para pegawainya sudah dilatih dalam mengelola dan memanfaatkan sampah. Sedangkan di unit lain yaitu UPT Pengangkutan Sampah masih menggunakan sistem konvensional kumpul-angkut-buang. Maka diharapkan unit lain pun mulai menggunakan sistem seperti UPT PPS dengan merevolusi tupoksi UPT pengangkutan dari paradigma lama ke paradigma baru sehingga kemampuan pegawai dapat berkembang serta mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA.

B. Kuantitas

Dilihat dari sisi kuantitas belum memadai, misalnya Kabupaten Bandung belum memiliki TPA sendiri, sehingga sampah dibuang ke TPA Sarimukti Kabupaten Bandung Barat dengan jarak yang jauh, antrian panjang di TPA, serta biaya KJP dan KDN yang tinggi. Sampah dari Kabupaten Bandung cukup banyak dan kurangnya jumlah armada pengangkutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa berdasarkan hitungan matematis *masterplannya* bahwa rasio sampah per orang per harinya 0,4 X 3,7 juta penduduk maka sehari itu (1480 ton) atau kurang lebih 1500 ton maka butuh 750 unit dengan kapasitas 1 unit = 2 ton. Jadi dari rasio 750 armada kita baru punya 110 armada. Keluhan lain terkadang kendaraannya mogok, namun mereka berusaha agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengangkutan sampah dengan berkoordinasi pada rekan kerja lainnya untuk menggantikan tugasnya sementara. Kabid Pengelolaan sampah mengatakan bahwa “40% jumlah kendaraan kami digunakan dalam keadaan terpaksa”. Jika terus berpaku pada pendekatan penanganan sampah yang bersifat konvensional, maka kuantitas sampah yang dihasilkan dengan kuantitas sarana pengangkutan yang tersedia tidak dapat terpenuhi secara maksimal.

C. Ketepatan Waktu

Berdasarkan hasil observasi penulis umumnya bahwa waktu standar telah diatur. Namun para pegawai di lapangan terkadang bekerja secara *overtime*. Rata-rata dimulai jam 6 pagi bagi yang giliran mengangkut ke TPA, terkadang mereka bisa pulang jam 7- 8 malam dan tidak mengeluh. Selama pandemi pegawai ada yang tidak mengambil jatah *Work From Home* (WFH), baik pegawai kantor atau lapangan karena tuntutan pekerjaan. Dalam 1 bulan mereka bekerja 25 hari, terkadang di waktu libur tetap bekerja. Karena sampah diproduksi tiap hari. Hal ini didukung oleh dedikasi pegawai. Namun tidak selalu *overtime* dalam bekerja, jika situasinya lagi “beruntung” mereka bisa pulang lebih cepat, tergantung kondisi misalnya kendaraan mogok sehingga tugasnya digantikan dengan yang lain, adanya pembagian kendaraan dengan sistem bergilir, misalnya kendaraan tertentu diperuntukan untuk diangkut ke TPA Sarimukti maka pegawai yang kebagian di kendaraan tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pegawai di kendaraan yang hanya dibawa ke TPST/TPS tertentu, tergantung jarak tempuh, terkadang adanya perintah dadakan, atau event tertentu.

D. Efektivitas

Indikator efektivitas terkait dengan tingkat penggunaan sumber daya organisasi dalam pelaksanaan tupoksi. Prioritas anggaran dari pemerintah untuk bidang pengelolaan sampah dianggap “tidak terlalu penting”, anggaran lebih tinggi diprioritaskan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Namun Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Naser lebih perhatian terhadap lingkungan, selain melalui beberapa SOP pengelolaan sampah di atas ada beberapa program lain seperti Gerakan Sabilulungan Pengurangan Penggunaan Plastik, *RW Zero Waste*, Kampung Sabilulungan bersih sampah (SABER), PUSPA, dan merekrut kader-kader lingkungan yang bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Strategi tersebut cukup efektif dalam mengatasi permasalahan sampah. Namun tidak lepas dari permasalahan seperti luasnya wilayah Kabupaten Bandung sulit untuk *cover* semuanya, program-program tersebut lebih kepada perubahan perilaku masyarakat sehingga yang namanya perilaku itu dinamis, berubah-ubah, bertahap dan perlu proses dan waktu.

E. Kemandirian

Tingkat komitmen dan rasa tanggung jawab pegawai berdasarkan hasil observasi penulis, pegawai bekerja dengan baik, berdedikasi, mandiri, dan terkadang bekerjad di hari libur demi tanggung jawab dan kesempurnaan tugasnya. Para pegawai memiliki rasa tanggung jawab secara bersama, misalnya ketika mobil mogok melalui kerja sama antara sesama biasanya digantikan yang lain sambil diperbaiki oleh bengkel. Demikian pula pada pegawai kantor. Kantor tempat bekerja mereka bidang pengelolaan sampah, ternyata menyatu langsung dengan UPT Pengangkutan Sampah Soreang sebagai TPST Cikaliktik dan penyimpanan armada pengangkutan sampah, sehingga lingkungan kerja sekitar perkantoran tampak kumuh, bau, dan kotor apalagi ketika musim hujan tanah becek dan kotor, namun pegawai kantoran tersebut tetap konsisten bekerja memenuhi target untuk capaiannya, tidak mengeluh dan bekerja sesuai tupoksinya.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan penting sisi positif dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung saat ini di bawah kepemimpinan Bupati Kabupaten Bandung Dadang M. Naser periode 2015-2020 membawa paradigma baru dalam pengelolaan sampah yang berbeda, lebih kepada pendekatan perubahan perilaku masyarakat serta lebih kepada edukasi praktek langsung, bagaimana masyarakat sebagai sumber sampah juga sekaligus sebagai sumber solusi.

Jika dibandingkan dengan temuan pada penelitian (Julian, 2018) mengenai Kinerja Dinas lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah di Kecamatan Baleendah dan pada penelitian (Lusi, 2018) dengan penelitiannya yang berjudul Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek) hasil penelitian lebih kepada masalah pengangkutan sampah dan bagaimana pengelolaan sampah melalui metode konvensional / metode penanganan sampah

Berbeda dengan penemuan penelitian penulis, bahwasanya Dinas Lingkungan Kabupaten Bandung telah meluncurkan dua metode pengelolaan sampah yaitu metode konvensional / penanganan sampah dan metode pengurangan sampah. pada metode penanganan sampah, melalui UPT Pengangkutan Sampah yang terbagi menjadi UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah, Soreang, Rancaekek dan Ciparay. Sedangkan untuk metode pengurangan sampah baru terbentuk 1 titik yakni UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan sampah yang berlokasi di Jelekong. UPT ini sangat menarik dan penting untuk diketahui oleh seluruh OPD di Indonesia agar dapat meniru role model ini.

UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan sampah yang berlokasi di Jelekong ini juga sebagai tempat edukasi atau dikenal dengan PUSPA Jelekong / Pusat Edukasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah). UPT ini masih baru dan tentu masing banyak kekurangan-kekurangan. Sehingga diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi paradigma baru dalam pengelolaan sampah kedepannya.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat kinerja aparatur dinas lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Penghambat dan pendukung Kinerja Aparatur Dinas Lingkungan Hidup

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG
1	Keterbatasan anggaran dan ketersediaan lahan dan TPA	Adanya dukungan Bupati Kabupaten Bandung yang menjabat saat ini
2	UPTPPS baru tersedia di satu titik saja	Dedikasi para pegawai yang cukup tinggi dalam pelaksanaan tugas
3	Standar kompetensi pegawai	DLH tetap konsisten melayani pengangkutan sampah
4	Kurangnya SDM dalam bidang Bimtek	Terbentuknya kader lingkungan
5	Mahalnya mesin pengelola sampah	Kerjasama dengan beberapa pihak
6	Perilaku masyarakat dan dinamika sosial	
7	Lemahnya Penegakan Hukum	
8	Produsen yang tidak bertanggung Jawab	

Sumber: diolah penulis, 2021.

IV. Kesimpulan

Kinerja Aparatur dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah sudah berjalan dengan baik, namun terkendala berbagai faktor penghambat internal yaitu keterbatasan anggaran dan lahan pengelolaan sampah seperti TPA, jumlah UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah yang cukup efektif dalam pengelolaan sampah baru satu titik saja sehingga belum memadai melayani seluruh wilayah Kabupaten Bandung, rendahnya kompetensi pegawai, kurangnya SDM dalam bidang bimtek serta mahalnya biasa mesin pengelolaan sampah. Sedangkan faktor penghambat eksternal yaitu buruknya perilaku masyarakat, tingginya dinamika sosial, rendahnya penegakan hukum, produsen yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah hasil produknya, serta gangguan oknum-oknum LSM ada media yang melontarkan tuduhan-tuduhan negatif bagi instansi. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung adalah memperkuat metode pengurangan dengan pendekatan sistem, menetapkan beberapa kebijakan seperti segera melakukan pembentukan UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah yang direncanakan ada 4 titik, menetapkan beberapa regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas, melakukan kerjasama dengan semua pihak serta memberikan apresiasi kepada pegawai dan pegiat lingkungan.

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu luasnya wilayah kabupaten Bandung sulit bagi peneliti menyusuri secara keseluruhan, waktu dan biaya sehingga penulis melakukan penelitian pada beberapa kecamatan saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) Penulis sadar akan awalnya temuan ini, sehingga penulis menyarankan untuk dapat melakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang berkaitan dengan kinerja aparatur dalam pengelolaan sampah untuk menemukan hasil secara mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung beserta jajarannya, dan kepala UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian, serta terimakasih penulis sampaikan kepada Ibu Bapak dosen dan seluruh pihak yang telah mendukung penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Sedarmayanti. 2017. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja. Bandung: PT Refika Aditama.

Sejati, Kuncoro. 2009. Pengolahan Sampah Terpadu. Yogyakarta: Kanisius.

Simangunsong, Fernandes. 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.

Sinambela, Lijan Poltak. 2012. Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Perbub Kabupaten Bandung Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bandung Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

C. Lain-lain

Abdalloh, Mildan. 2019. “Kekurangan Armada Pengangkut, Sampah Kabupaten Bandung 1.440 Ton Per Hari”, <https://ayobandung.com/read/2019/06/11/54757/kekurangan-armada-pengangkut-sampah-kabupaten-bandung-1440-ton-per-hari>, diakses pada 18 September 2020 pukul 21.20 WIB.

Dokumen – dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

Fattah. 2019. “Saatnya Kabupaten Bandung Miliki TPA Sampah”, <https://www.dara.co.id/saatnya-kabupaten-bandung-miliki-tpa-sampah.html>, diakses pada 23 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.